

Efektivitas Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

* **Nurul Afwani Yona¹, Rizky Setiawan²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : nurulafwaniyona@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem SIP4D sudah tepat sasaran dalam menjangkau objek penerimaan PAD, namun pencapaian target PAD belum konsisten setiap tahunnya, disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis. Pelaksanaan sosialisasi program SIP4D berjalan cukup efektif, namun keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Serta pemantauan dan evaluasi sistem SIP4D belum berjalan secara real-time dan menyeluruh sehingga perlu diperbaiki kedepannya.

Kata Kunci: Pendapatan daerah, Sistem informasi, Laporan keuangan

Abstract

This study aims to determine and analyze the effectiveness of the information system for recording and managing regional revenue receipts in increasing regional original revenue at the Regional Revenue Agency of Indragiri Hulu Regency. This research method is qualitative research that is descriptive and tends to use analysis. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation and data analysis. The results of the study indicate that the SIP4D system is on target in reaching PAD revenue objects, but the achievement of PAD targets has not been consistent every year, due to technical and non-technical factors. The implementation of the SIP4D program socialization has been quite effective, but community involvement needs to be increased. Also, monitoring and evaluation of the SIP4D system has not been running in real-time and comprehensively so it needs to be improved in the future.

Keywords: Regional Income, Information Systems, Financial Statement

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi berbagai kendala dalam proses pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah, seperti rendahnya akurasi data, lemahnya koordinasi antarsektor, keterlambatan pelaporan, serta terbatasnya sistem pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi. Untuk menjawab tantangan tersebut, transformasi digital dalam bentuk penerapan sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah menjadi salah satu solusi yang strategis.

Di Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerimaan PAD telah mengembangkan serta menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung proses pencatatan dan pengelolaan pendapatan. Namun demikian, kehadiran sistem informasi tidak serta-merta menjamin terjadinya peningkatan PAD secara signifikan. Diperlukan evaluasi yang mendalam untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan benar-benar efektif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Dalam era digital saat ini, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai media strategis dalam memperoleh berbagai informasi. Menurut Styles dan Tennyson (2007), internet merupakan sarana yang paling mudah diakses oleh masyarakat serta memiliki biaya yang efisien bagi pemerintah dalam mendistribusikan informasi kepada publik. Untuk memfasilitasi penyebaran informasi terkait pengelolaan keuangan daerah dan aspek pemerintahan lainnya, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebuah sistem yang terintegrasi dan saling terhubung. Sistem ini telah diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta diadaptasi lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta didukung oleh Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 41 tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pencatatan penerimaan PAD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, diharapkan dapat memanfaatkan sistem informasi yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, meskipun sudah ada sistem informasi yang digunakan, proses pengelolaan PAD masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses dan pemahaman yang merata terhadap sistem informasi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti petugas Badan Pendapatan Daerah, Dinas terkait, dan wajib pajak itu sendiri. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, serta mempengaruhi kualitas pencatatan dan pengelolaan data keuangan daerah.

Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya integrasi antara sistem informasi yang ada dengan berbagai sistem lain di pemerintahan daerah, yang berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan data pendapatan dan pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat. Berikut adalah tabel pelaporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	115.670.377.495,00	118.978.915.053,47
2.	2020	107.175.422.806,00	34.469.243.235,00
3.	2021	131.646.768.772,00	122.885.367.481,97
4.	2022	126.031.143.734,00	133.354.604.605,54
5.	2023	138.766.062.882,00	133.293.802.546,30

Sumber : Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tercatat jumlahnya tidak konsisten dengan arti mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak sedikit.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada bidang penerimaan yang mana dalam penggunaan sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dapat dalam penggunaan tentu saja masih menghadapi banyak masalah. Permasalahan pegawai yang bersangkutan dalam kinerja mereka antaralain : 1) keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh para pegawai, 2) kurangnya kelancaran jaringan disekitar daerah Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam mengakses sistem atau aplikasi terkait, 3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak tepat waktu dalam memberikan atau pun menyerahkan data kepada pegawai yang bertugas, dan 4) Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang penggunaan sistem yang terintegrasi.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sistem informasi yang efisien dan terintegrasi memiliki peran penting dalam memonitor dan mengelola pendapatan daerah secara tepat waktu dan akurat. Namun, meskipun teknologi telah diterapkan dalam berbagai sektor pemerintahan, tantangan yang dihadapi sering kali terkait dengan ketepatan, kecepatan, dan transparansi dalam pencatatan penerimaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem informasi yang ada dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Menurut penelitian sebelumnya, Implementasi Sistem Informasi seperti SIPD atau SIPKD atau SIP4D telah terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dan memberikan akses data yang lebih akurat serta tepat waktu bagi pengambil kebijakan (Nalle, 2023). Namun, keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kemampuan pengguna, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan, maka dapat ditemukan beberapa fenomena penelitian ini yaitu : 1) Penerapan sistem informasi belum menjangkau seluruh sektor pendapatan secara efektif, 2) Minimnya sosialisasi dan edukasi dari pihak lembaga terkait kepada petugas sistem menyebabkan rendahnya tingkat ketepatan waktu dalam pelaporan, 3) Peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi

dalam pengelolaan PAD, masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realisasi, dan 4) Sistem informasi yang ada belum didukung dengan pemantauan secara real-time dan menyeluruh.

METODE

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Tipe penelitian deskriptif yang dimaksud adalah memberikan gambaran fenomena atau kenyataan yang terjadi baik bersifat alami maupun rekayasa manusia mengenai Efektivitas Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi dan terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah. Teknik penetapan informan atau penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan berasal dari 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program

Pada indikator ini penulis mewawancarai beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa sistem informasi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu telah menunjukkan ketepatan sasaran dari sisi fungsi sistem. Seluruh fitur utama seperti pencatatan penerimaan, pemantauan transaksi, serta pelaporan keuangan telah dimanfaatkan secara optimal. Informan menyatakan bahwa sistem ini mempermudah proses kerja dan mempercepat penyusunan laporan, dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan.

Dari segi jangkauan terhadap wajib pajak, sistem ini telah mampu mencatat data pembayaran dari berbagai sektor pajak daerah secara elektronik, seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa program tepat sasaran dalam menjangkau target utama, yaitu seluruh subjek dan objek pajak yang menjadi sumber PAD.

Dari aspek ketepatan waktu, sistem ini juga dinilai efektif. Setiap transaksi penerimaan dapat dipantau secara real-time, dan laporan dapat dihasilkan secara otomatis tanpa harus menunggu akhir bulan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data aktual.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa aspek ketepatan sasaran pengguna masih menghadapi kendala. Beberapa pegawai, terutama yang berusia di atas 45 tahun, belum sepenuhnya menguasai sistem informasi yang digunakan. Hal ini menghambat optimalisasi fungsi sistem di lapangan. Oleh karena itu, meskipun program ini secara teknis sudah tepat sasaran, dari sisi pengguna masih dibutuhkan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Sosialisasi Program

Penulis melakukan observasi di lapangan, pelaksanaan sosialisasi program SIP4D oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu. Selama pengamatan, tidak ditemukan kegiatan berupa penyuluhan, pengumuman publik, ataupun distribusi materi informasi yang ditujukan kepada masyarakat karna masyarakat bukanlah pengguna sistem ini. Informasi yang tersedia cenderung bersifat internal dan hanya disampaikan kepada pegawai atau stakeholder teknis melalui forum terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami mekanisme operasional sistem.

Pencapaian Tujuan Program

Peneliti melakukan observasi lapangan penerapan SIP4D (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan indikasi positif terhadap pencapaian tujuan program, khususnya dalam hal efisiensi pencatatan penerimaan, akurasi data, serta percepatan pelaporan keuangan daerah.

Dari sisi infrastruktur, perangkat teknologi yang tersedia telah memadai dan mendukung kelancaran implementasi SIPAD, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam pelatihan teknis lanjutan bagi operator di tingkat kecamatan atau unit pelaksana teknis. Secara administratif, hasil pencatatan pendapatan melalui SIPAD terlihat tertata dan terdokumentasi dengan baik, memudahkan proses monitoring dan evaluasi oleh pihak internal. Namun demikian, selama observasi tidak ditemukan adanya publikasi data kepada masyarakat secara terbuka, baik melalui media digital maupun papan informasi publik, yang dapat menjadi penghambat dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Pemantauan Program

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, penerapan SIPAD (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan program, terutama dalam aspek efisiensi operasional dan akurasi pencatatan penerimaan daerah. Sistem ini telah diintegrasikan dengan baik dalam rutinitas kerja pegawai, khususnya dalam proses input data penerimaan yang dilakukan secara harian. Hal ini mencerminkan tingkat kedisiplinan dan konsistensi operasional yang tinggi dalam implementasinya. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti perangkat komputer, jaringan internet, serta sistem antarmuka SIPAD terlihat memadai dan mampu menunjang pelaksanaan tugas secara optimal, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis lanjutan di tingkat kecamatan.

Dari sisi dokumentasi dan tata kelola, pencatatan pendapatan yang dilakukan melalui SIPAD terlihat rapi, sistematis, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak internal, sehingga sangat membantu dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Namun, dari hasil pengamatan juga ditemukan bahwa data terkait pendapatan belum sepenuhnya dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka, baik melalui website resmi, media sosial, maupun papan informasi publik.

Faktor-Faktor mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah

Peneliti melakukan observasi di lapangan terhadap karakteristik agen pelaksana dalam penerapan Sistem Informasi Pencatatan dan Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah (SIPAD), terlihat bahwa agen pelaksana menunjukkan kapasitas teknis dan administratif yang cukup baik. Pegawai yang terlibat memiliki pemahaman terhadap alur kerja sistem serta menjalankan prosedur operasional secara sistematis. Hal ini ditunjukkan

melalui penggunaan SIPAD dalam kegiatan pencatatan harian penerimaan yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPKAD, seperti pemantauan langsung dan laporan harian, yang menunjukkan adanya akuntabilitas dan kontrol internal yang cukup kuat.

Proses pemantauan ini juga didukung dengan evaluasi kinerja berkala dan rekonsiliasi data antarunit kerja, yang mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan teknis dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan jaringan, error sistem, dan isu dalam integrasi data yang menyebabkan double rincian. Tantangan tersebut berpotensi mengganggu akurasi dan efisiensi sistem jika tidak segera diatasi.

Meskipun demikian, agen pelaksana menunjukkan respons adaptif dalam menghadapi kendala tersebut, antara lain dengan melakukan pelatihan, peningkatan keamanan sistem, serta penguatan pemantauan secara terpusat. Secara umum, karakteristik agen pelaksana di lokasi observasi mencerminkan profesionalisme, kemampuan teknis yang berkembang, serta komitmen terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang dilakukan terhadap efektivitas sistem informasi pencatatan dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah (SIP4D) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dapat disimpulkan bahwa sistem SIP4D sudah tepat sasaran dalam menjangkau objek penerimaan PAD, namun pencapaian target PAD belum konsisten setiap tahunnya, disebabkan oleh faktor teknis dan non-teknis.

Pelaksanaan sosialisasi program SIP4D berjalan cukup efektif, terutama dalam menyampaikan informasi kepada stakeholder internal. Namun, keterlibatan masyarakat atau wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pelatihan yang lebih menyeluruh. Selain itu, tujuan dari penggunaan sistem SIP4D sebagian besar telah tercapai, namun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan signifikan PAD karena masih terdapat kendala teknis dan sumber daya manusia yang belum optimal.

Pemantauan dan evaluasi sistem SIP4D belum berjalan secara real-time dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala seperti gangguan server, keterbatasan jaringan, dan tidak tersedianya laporan yang up-to-date, sehingga menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem mencakup infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem secara optimal, dan kurangnya monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqni Adisi, C. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3)(3), 150–164.
- Arif, R. N., Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansiku*. Vol 3(1)
- Ekaputra, D.N (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*. 21(1):62-79

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan tentang sistem informasi pengelolaan dana daerah (SIP4D)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Ketut Aditya Teken, I., & Romarina, A. (2024). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Provinsi Bali*.
- Lewis, B. D. (2019). Legislature Size, Local Government Expenditure and Taxation, and Public Service Access in Indonesia. *Studies in Comparative International Development*, 54(2), 274–298. <https://doi.org/10.1007/s12116-019-09278-1>
- Omega Nalle, M. (2023). *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang*.
- Paat, F. F., Saleh, S. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi The Influence of the Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) on the Quality of Financial Reports in the Cimahi City Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 1–8.
- Ririn Dadut, F. (2021). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- United Nations. (2016). *E-government survey 2016: E-Government in support of sustainable development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Yuliusman, Wahyu, G., & Zulma, M. (2023). Determinants of Local Government Financial Reporting Quality: Evidence from Jambi, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 14(4), 9–16. <https://doi.org/10.7176/rjfa/14-4-02>